

- (3) Melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala terhadap capaian kinerja yang terintegrasi dengan sistem perencanaan dan penganggaran.
- (4) Hasil evaluasi LAKIP dapat dimanfaatkan untuk memberikan *reward and punishment*.

Demikian, LAKIP ini disusun berdasarkan data dan fakta yang ada untuk dapat dipergunakan sebagai salah satu jawaban terkait akuntabilitas kinerja Setda Kabupaten Bengkalis.

BAB IV PENUTUP

Berdasarkan uraian Laporan Akuntabilitas Kinerja Sekretariat Daerah Kabupaten Bengkalis Tahun 2019 di atas dapat disimpulkan, sebagai berikut:

1. Secara umum telah memperlihatkan pencapaian kinerja yang sangat baik atas sasaran-sasaran strategisnya.
2. Pencapaian kinerja sasaran strategis sebagaimana yang telah dituangkan dalam Perjanjian Kinerja (PK) Sekretariat Daerah Kabupaten Bengkalis tahun 2019 telah dicapai dengan predikat "**Sangat Berhasil**", dengan nilai rata – rata capaian kinerjanya sebesar 101,60%. Sasaran strategis sebagaimana yang telah dituangkan dalam Perjanjian Kinerja (PK) Sekretaris Daerah tahun 2019 telah dicapai dengan predikat "**Sangat Berhasil**".
3. Berdasarkan analisis efisiensi penggunaan sumberdaya dalam mencapai sasaran, dilakukan dengan cara membandingkan persentase realisasi penyerapan anggaran dengan rata- rata capaian kinerja sasaran, dapat disimpulkan bahwa dari 5 (lima) sasaran kinerja seluruhnya telah menggunakan sumberdaya dengan sangat efisien.

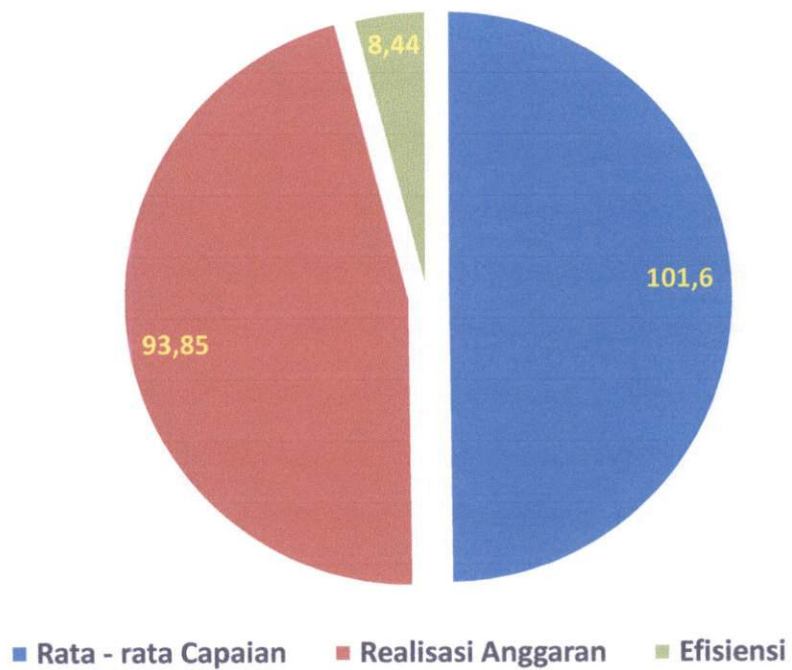
Faktor utama yang mempengaruhi keberhasilan tercapainya indikator dan kinerja di Sekretariat Daerah Kabupaten Bengkalis, antara lain: karena adanya komitmen yang tinggi serta dukungan dari pimpinan dan jajaran staf Sekretariat Daerah Kabupaten Bengkalis. Namun demikian, untuk tahun 2019, Sekretariat Daerah Kabupaten Bengkalis tetap berkomitmen untuk mempertahankan dan meningkatkan kinerja dengan menerapkan prinsip-prinsip *good governance* dan *clean governance*.

Beberapa langkah yang akan ditempuh untuk meningkatkan kinerja pada tahun 2019, antara lain sebagai berikut:

- (1) Review Renstra Setda Kabupaten Bengkalis Tahun 2016 – 2021.
- (2) Realisasi atas Perjanjian Kinerja (PK) maupun Indikator Kinerja Utama (IKU) tahun yang lalu, dijadikan salah satu pertimbangan bagi Tim Anggaran untuk memberikan anggaran pada bagian terkait.

berarti bahwa pencapaian kinerja dari sisi pelaksanaan program telah dicapai dengan cara yang sangat efisien karena realisasi anggarannya lebih kecil jika dibandingkan dengan target yang ditetapkan dan juga lebih kecil dari realisasi capaian kinerja.

Gambar 3: Perbandingan Persentase Rata- Rata Capaian Kinerja dengan realisasi penyerapan anggaran dan Tingkat Efisiensi pada tahun 2019



4	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Setda Kabupaten Bengkalis	100%	1.716.613.900,00	1.668.822.620,00	97,22%
5	Harmonisasi Peraturan Daerah (Perda)	100%	2.351.066.100,00	1.982.006.900,00	84,30%
Jumlah		126,89	95.928.418.462	90.026.668.960	91,56%

3.4. Analisis Efisiensi

No	Sasaran	Rata-Rata Capaian Kinerja (%)	Realisasi Anggaran (%)	Tingkat Efisiensi (%)
1	2	3	4	5 = 100%-Kol 4
1	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	108	92,04	7,96
2	Meningkatnya kualitas Reformasi Birokrasi (RB)	100	91,61	8,39
3	Meningkatnya Kinerja Setda Kabupaten Bengkalis	100	91,25	8,75
4	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Setda Kabupaten Bengkalis	100	97,22	2,78
5	Harmonisasi Peraturan Daerah (Perda)	100	84,30	15,70
Jumlah		101,60	93,85	8,44

Berdasarkan tabel efisiensi tersebut di atas dapat diketahui bahwa perbandingan persentase rata-rata capaian kinerja sasaran dengan realisasi penyerapan anggaran pada tahun 2019 secara umum menunjukkan tingkat efisiensi anggaran yang tinggi, yaitu sebesar 8,44%. Hal ini bisa dilihat dari lebih besarnya capaian kinerja jika dibandingkan dengan penyerapan anggarannya. Ini

3.3. Realisasi Anggaran

Realisasi anggaran Sekretariat Daerah Kabupaten Bengkalis Tahun 2019 yang dimanfaatkan untuk mencapai sasaran yang telah ditetapkan, adalah sebesar Rp.48.079.082.183,00 atau 91,56% dari pagu anggaran prioritas sebesar Rp.52.508.991.936,00.

Penyerapan anggaran terbesar terdapat pada **sasaran** Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Setda Kabupaten Bengkalis, yaitu sebesar Rp.1.668.822.620,00 (97,22%). Sementara, penyerapan anggaran yang terkecil pada **sasaran** Harmonisasi Peraturan Daerah (Perda) yaitu sebesar Rp. 1.982.006.900,00 (84,30%). Selanjutnya, terkait dengan realisasi anggaran setiap program secara rincian sebagaimana terlampir.

Rincian capaian kinerja dan anggaran ditahun 2019 setiap sasaran sebagai berikut:

No.	Sasaran	Rata-Rata Capaian Kinerja (%)	Anggaran		
			Target (Rp.)	Realisasi (Rp.)	%
1	2	3	5	6	6
1	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	108%	22.601.923.179,00	20.803.485.269,00	92,04%
2	Meningkatnya kualitas Reformasi Birokrasi (RB)	100%	13.077.630.907,00	11.979.822.848,00	91,61%
3	Meningkatnya Kinerja Setda Kabupaten Bengkalis	100%	12.761.757.850,00	11.644.944.546,00	91,25%

Sasaran 5 :

Harmonisasi Peraturan Daerah (Perda).

Tabel 5. Capaian Indikator pada sasaran Harmonisasi Peraturan Daerah (Perda).

No	Indikator	2017	2018	2019			Target Akhir RPJMD (2021)	Capaian 2017 Terhadap 2021 (%)
		Capaian	Capaian	Target	Relisasi	Capaian		
1.	Persentase Peraturan Daerah (Perda) yang lulus uji harmonisasi	B	B	70%	70%*	100%	90	80%
Rata-rata Capaian						100%		

Pada tabel 5 di atas terlihat bahwa pada tahun 2019 capaian yang telah diproyeksikan untuk Persentase Peraturan Daerah (Perda) yang lulus uji harmonisasi adalah sebesar 100% atau dengan kategori sangat berhasil dengan realisasi sebesar 70%. Nilai ini telah mencapai target dari yang ditetapkan namun belum bisa mencapai target akhir RPJMD tahun 2021.

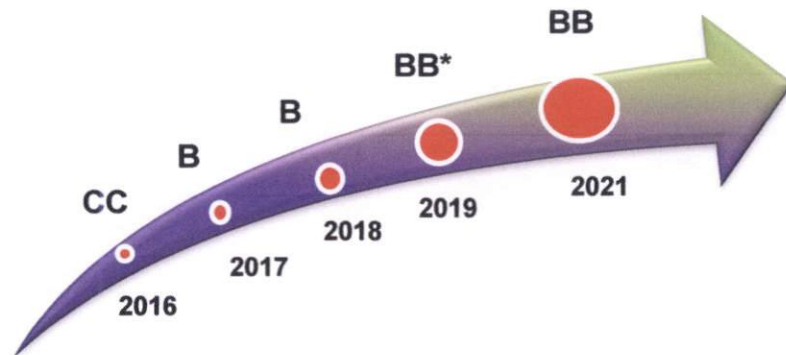
Meskipun tingkat capaian indikator kinerja telah mencapai target dari yang ditetapkan pada tahun 2019, namun perbaikan secara menyeluruh baik dalam mekanisme perencanaan, penilaian hingga evaluasi terus dilakukan secara intensif, agar nilai akhir ditahun akhir RPJMD dapat lebih baik.

Faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan

Persentase Peraturan Daerah (Perda) yang lulus uji harmonisasi dipengaruhi oleh beberapa faktor, diantaranya adalah;

- (1) Semakin baiknya sistem manajemen yang ada di Pemerintah Kabupaten Bengkalis;
- (2) Semakin mudahnya masyarakat dalam mengakses Perda – Perda yang telah diharmonisasi/ yang di publish oleh Pemkab Bengkalis;
- (3) Semakin meningkatnya kemudahan dalam pengurusan dalam hal harmonisasi Perda.

Gambar 2: Capaian Indikator LAKIP



Faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan

Predikat akuntabilitas kinerja Sekretariat Daerah Kabupaten Bengkalis dipengaruhi oleh beberapa faktor, diantaranya adalah;

- (1) Adanya keselarasan antara dokumen perencanaan Pemerintah Kabupaten Bengkalis, yaitu RPJMD, RENSTRA Perangkat Daerah dan RKPD serta meningkatnya pencapaian Indikator Kinerja Kunci (IKK) dalam penyelenggaraan urusan Pemerintah Daerah.
- (2) Penetapan Peraturan Bupati Bengkalis nomor 52 Tahun 2019 tentang penyusunan dokumen SAKIP.
- (3) Renstra, Dokumen Perencanaan, dan Renja Sekretariat Daerah Kabupaten Bengkalis semakin baik.
- (4) IKU Sekretariat Daerah Kabupaten Bengkalis sudah terukur serta capaiannya mampu melebihi target yang ditetapkan.
- (5) Tersedianya kebutuhan dasar yang memadai dalam melaksanakan tugas pelayanan, seperti; ruangan kerja, komputer, alat transportasi, KAK, peraturan perundang – undangan dan lain – lain

(4) Adanya prosedur dan pembagian tugas atau kerja yang jelas, sebagaimana yang telah dituangkan dalam Peraturan Bupati Bengkalis No. 34 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Eselonering, Tugas, Fungsi dan Uraian Tugas serta Tata Kerja pada Sekretariat Daerah Kabupaten Bengkalis. Dalam Peraturan Bupati tersebut dengan rinci menjelaskan uraian tugas masing - masing bagian dan sub bagian di lingkungan sekretariat daerah Kabupaten Bengkalis.

Sasaran 4 :

Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Setda Kabupaten Bengkalis.

Tabel 4. Capaian Indikator pada sasaran Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Setda Kabupaten Bengkalis

No	Indikator	2017	2018	2019			Target Akhir RPJMD (2021)	Capaian 2017 Terhadap 2021 (%)
		Capaian	Capaian	Target	Relisasi	Capaian		
1.	Predikat akuntabilitas kinerja Sekretariat Daerah Kabupaten Bengkalis	B	B	BB	BB*	Tercapai	BB	Tercapai
Rata-rata Capaian						100%		

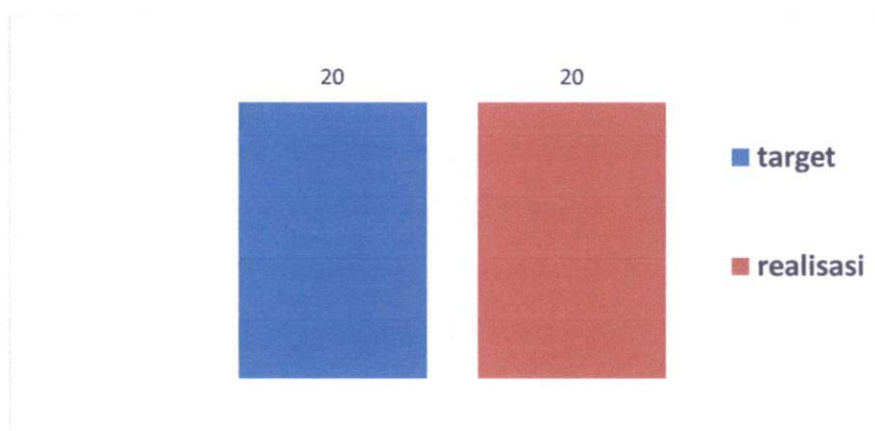
Pada tabel di atas terlihat bahwa pada tahun 2019 capaian yang telah diproyeksikan untuk nilai LAKIP adalah **BB*** (sangat baik). Nilai ini telah mencapai target dari yang ditetapkan pada tahun 2019. Dan telah mencapai target capaian akhir RPJMD tahun 2021.

Meskipun tingkat capaian indikator kinerja telah mencapai target dari yang ditetapkan pada tahun 2019, namun perbaikan secara menyeluruh baik dalam mekanisme perencanaan, penilaian hingga evaluasi terus dilakukan secara intensif, agar nilai akhir ditahun akhir RPJMD dapat lebih baik.

Pada tabel 3 di atas terlihat bahwa pada tahun 2019 capaian yang telah diproyeksikan untuk Persentase peningkatan Kinerja Setda Kabupaten Bengkalis adalah tercapai (100%) dengan realisasi sebesar 20%. Nilai ini telah mencapai target dari yang ditetapkan namun belum bisa mencapai target akhir RPJMD tahun 2021.

Meskipun tingkat capaian rata-rata indikator kinerja telah mencapai target dari yang ditetapkan pada tahun 2019, namun perbaikan secara menyeluruh baik dalam mekanisme perencanaan, penilaian hingga evaluasi terus dilakukan secara intensif, agar nilai akhir ditahun akhir RPJMD dapat lebih baik.

Grafik 5. Target dan Realisasi pada Persentase peningkatan Kinerja Setda Kabupaten Bengkalis



Faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan

Persentase peningkatan Kinerja Setda Kabupaten Bengkalis ini dipengaruhi oleh beberapa faktor, diantaranya adalah;

- (1) Renstra, Dokumen Perencanaan, dan Renja Sekretariat Daerah Kabupaten Bengkalis semakin baik.
- (2) IKU Sekretariat Daerah Kabupaten Bengkalis sudah terukur serta capaiannya mampu melebihi target yang ditetapkan.
- (3) Tersedianya kebutuhan dasar yang memadai dalam melaksanakan tugas pelayanan, seperti; ruangan kerja, komputer, alat transportasi, KAK, peraturan perundang – undangan dan lain – lain

- (2) IKU Sekretariat Daerah Kabupaten Bengkalis sudah terukur serta capaiannya mampu melebihi target yang ditetapkan.
- (3) Tersedianya kebutuhan dasar yang memadai dalam melaksanakan tugas pelayanan, seperti; ruangan kerja, komputer, alat transportasi, KAK, peraturan perundang – undangan dan lain – lain
- (4) Adanya prosedur dan pembagian tugas atau kerja yang jelas, sebagaimana yang telah dituangkan dalam Peraturan Bupati Bengkalis No. 34 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Eselonering, Tugas, Fungsi dan Uraian Tugas serta Tata Kerja pada Sekretariat Daerah Kabupaten Bengkalis. Dalam Peraturan Bupati tersebut dengan rinci menjelaskan uraian tugas masing - masing bagian dan sub bagian di lingkungan sekretariat daerah Kabupaten Bengkalis.
- (5) Adanya komitmen, disiplin dan respon yang baik, baik dari pimpinan maupun staf dalam melaksanakan tugas yang diberikan.
- (6) Dalam setiap melaksanakan tugas, mendapat dukungan penuh dari pimpinan.
- (7) Adanya komunikasi yang efektif antar bagian dan sub bagian.
- (8)

Sasaran 3 :

Meningkatnya Kinerja Setda Kabupaten Bengkalis.

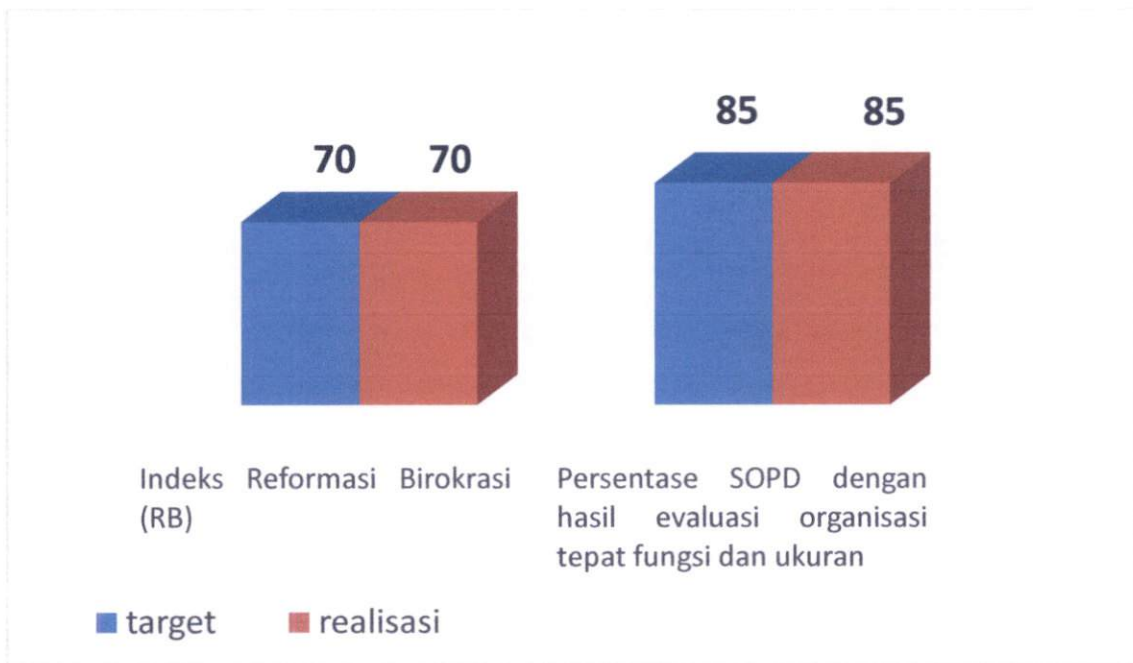
Tabel 3. Capaian Indikator pada sasaran meningkatnya Meningkatkan Kinerja Setda Kabupaten Bengkalis

No	Indikator	2017	2018	2019			Target Akhir RPJMD (2021)	Capaian 2017 Terhadap 2021 (%)
		Capaian	Capaian	Target	Relisasi	Capaian		
1.	Persentase peningkatan Kinerja Setda Kabupaten Bengkalis	-	-	20%	20%*	Tercapai	80	90%
Rata-rata Capaian						100%		

Pada tabel 2 di atas terlihat bahwa pada tahun 2019 capaian yang telah diproyeksikan untuk indeks Reformasi Birokrasi (RB) adalah tercapai dengan realisasi sebesar 70%. dan untuk realisasi pada indikator Persentase SOPD dengan hasil evaluasi organisasi tepat fungsi dan ukuran sebesar 85% dengan kategori tercapai. Nilai ini telah mencapai target dari yang ditetapkan pada tahun 2019 dan telah mencapai target capaian akhir RPJMD tahun 2021.

Meskipun tingkat capaian rata-rata indikator kinerja telah mencapai target dari yang ditetapkan pada tahun 2019, namun perbaikan secara menyeluruh baik dalam mekanisme perencanaan, penilaian hingga evaluasi terus dilakukan secara intensif, agar nilai akhir ditahun akhir RPJMD dapat lebih baik.

Grafik 4. Perbandingan target dan realisasi pada indikator Indeks Reformasi Birokrasi (RB) Persentase SOPD dengan hasil evaluasi organisasi tepat fungsi dan ukuran



Faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan

Meningkatnya Kinerja Pemerintah Daerah ini dipengaruhi oleh beberapa faktor, diantaranya adalah;

- (1) Renstra, Dokumen Perencanaan, dan Renja Sekretariat Daerah Kabupaten Bengkalis semakin baik.

Faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan

Keberhasilan sasaran meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik ini dipengaruhi oleh beberapa faktor, diantaranya adalah;

- (1) Adanya prosedur dan pembagian tugas/kerja yang jelas, sebagaimana yang telah dituangkan dalam Peraturan Bupati Bengkalis No. 34 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Eselonering, Tugas, Fungsi dan Uraian Tugas serta Tata Kerja pada Sekretariat Daerah Kabupaten Bengkalis. Dalam Peraturan Bupati tersebut dengan rinci menjelaskan uraian tugas masing - masing bagian dan sub bagian di lingkungan Sekretariat Daerah Kabupaten Bengkalis.
- (2) Adanya komitmen yang tinggi, disiplin dan respon yang baik dari Pimpinan dan Staf dalam melaksanakan tugas yang diberikan.
- (3) Terpenuhinya kebutuhan dasar yang memadai dalam melaksanakan tugas pelayanan, seperti; SOP/KAK/TOR, peraturan perundang – undangan dan lain – lain
- (4) Adanya komunikasi yang efektif antar bagian, sub bagian, pengguna layanan,*Stakeholder* dan instansi terkait pelayanan publik.

Sasaran 2 :

Meningkatnya Kualitas Reformasi Birokrasi (RB)

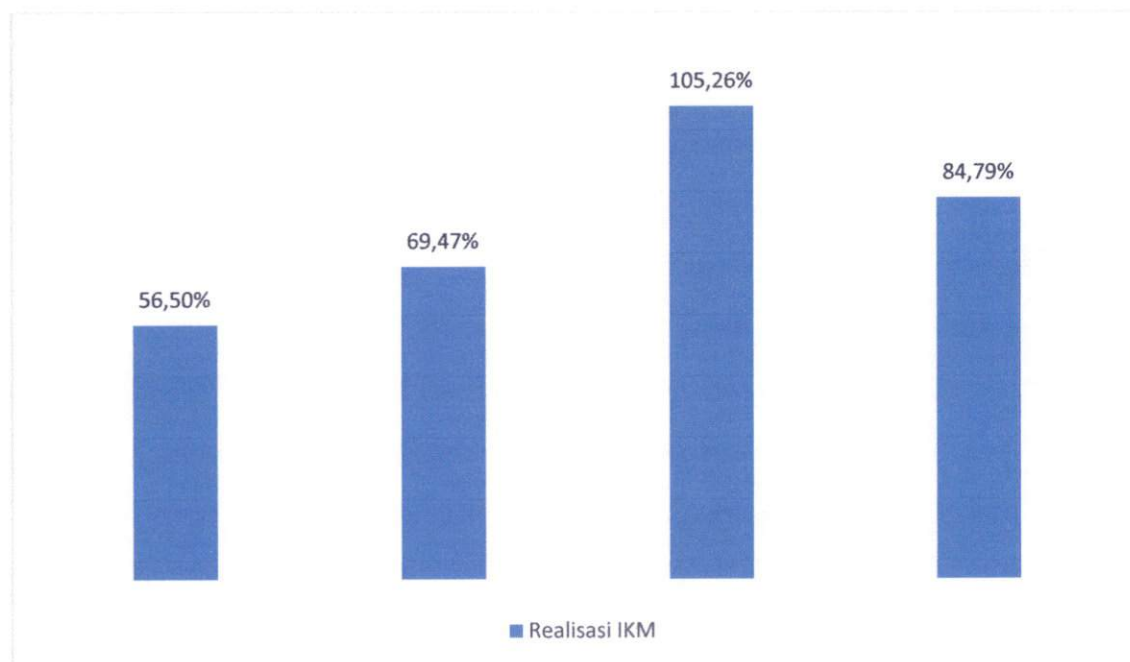
Tabel 2. Capaian Indikator pada sasaran meningkatnya kualitas Reformasi Birokrasi (RB)

No	Indikator	2016	2017	2018	2019			Target Akhir RPJMD (2021)	Capaian 2017 Terhadap 2021 (%)
		Capaian	Capaian	Capaian	Target	Relisasi	Capaian		
1.	Indeks Reformasi Birokrasi (RB)	-	-	-	70	70*	Tercapai	80	90%
2.	Persentase SOPD dengan hasil evaluasi organisasi tepat fungsi dan ukuran	-	-	-	85%	85%*	Tercapai	100%	85%
Rata-rata Capaian							100%		

Ket : *) Angka Prediksi, dalam proses analisis

Capaian Kinerja Indikator IKM tahun 2019, jika dibandingkan dengan capaian tahun 2018 mengalami penurunan namun tetap melebihi daripada target yang telah ditetapkan. Perbandingan capaian Indikator IKM Tahun 2018 dengan tahun 2019 dapat di ilustrasikan sebagai berikut.

Grafik 4 : Perbandingan Capaian Indikator IKM Tahun 2016– 2019



Padagrafik 4 di atas menunjukkan bahwa capaian indikator IKM dari tahun 2016 sampai tahun 2018 terus terjadi peningkatan secara signifikan. Hal ini menunjukkan adanya perbaikan dan peningkatan kinerja Setda Kabupaten Bengkalis.

Adapun untuk Indikator Persentase OPD dengan IKM minimal 70, jika dilihat dari table 1 diatas, untuk tahun 2019 sudah melebihi target yang telah ditetapkan yaitu dengan realisasi sebesar 111,11% dengan predikat *sangat berhasil*.

Adapun untuk indikator Persentase tindak lanjut penyelesaian pengaduan masyarakat, jika dilihat dari table 1 diatas, maka dapat dilihat bahwa dari tahun 2018 sampai 2019 tidak mengalami perubahan pada realisasi indikator tersebut namun tetap dengan realisasi yang sama yaitu 100% dengan predikat *sangat berhasil*. Dengan kata lain bahwa realisasi pada indikator tersebut telah memenuhi target yang telah ditetapkan.

Sasaran 1 :

Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik

Table 1. capaian indikator pada sasaran Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik

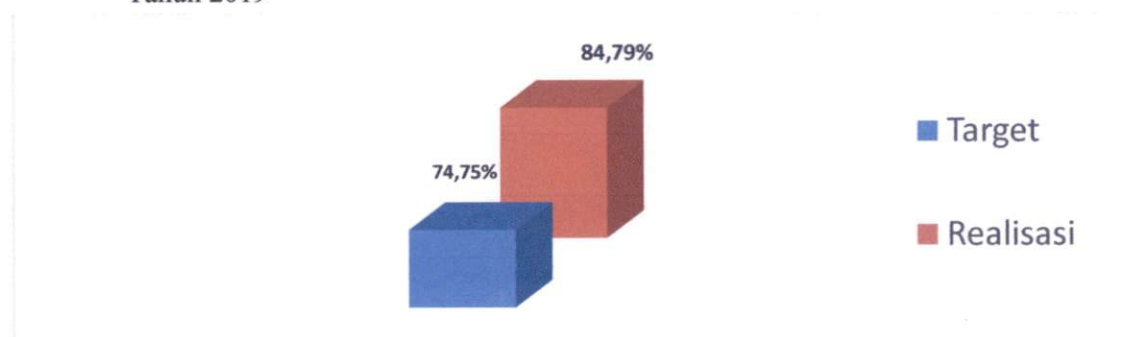
No	Indikator				TAHUN			Target Akhir RPJMD (2021)	Capaian 2019 Terhadap 2021
		2016	2017	2018	2019				
		Capaian	Capaian	Capaian	Target	Realisasi	Capaian		
1	IKM	56,50%	69,47%	105,26%	74,75%	84,79%*	113,43%	80%	105,98%
2	Persentase OPD dengan IKM minimal 70	-	-	-	90%	100%*	111,11%	100%	100%
3	Persentase tindak lanjut penyelesaian pengaduan masyarakat	-	-	100%	100%	100%*	100%	100%	100%
			Rata-rata Capaian			108,18%			

Ket: * angka sementara

Pada tabel di atas terlihat bahwa capaian rata - rata indikator pada tahun 2019 telah melebihi target, yaitu sebesar 108,18%. Meskipun tingkat capaian rata – rata indikator dinilai telah melebihi target yang telah ditetapkan pada tahun 2019 bahkan telah melebihi target akhir RPJMD tahun 2021, namun perbaikan secara menyeluruh baik dalam mekanisme perencanaan, penilaian hingga evaluasi terus dilakukan secara intensif, agar nilai akhir tahun RPJMD dapat lebih baik lagi.

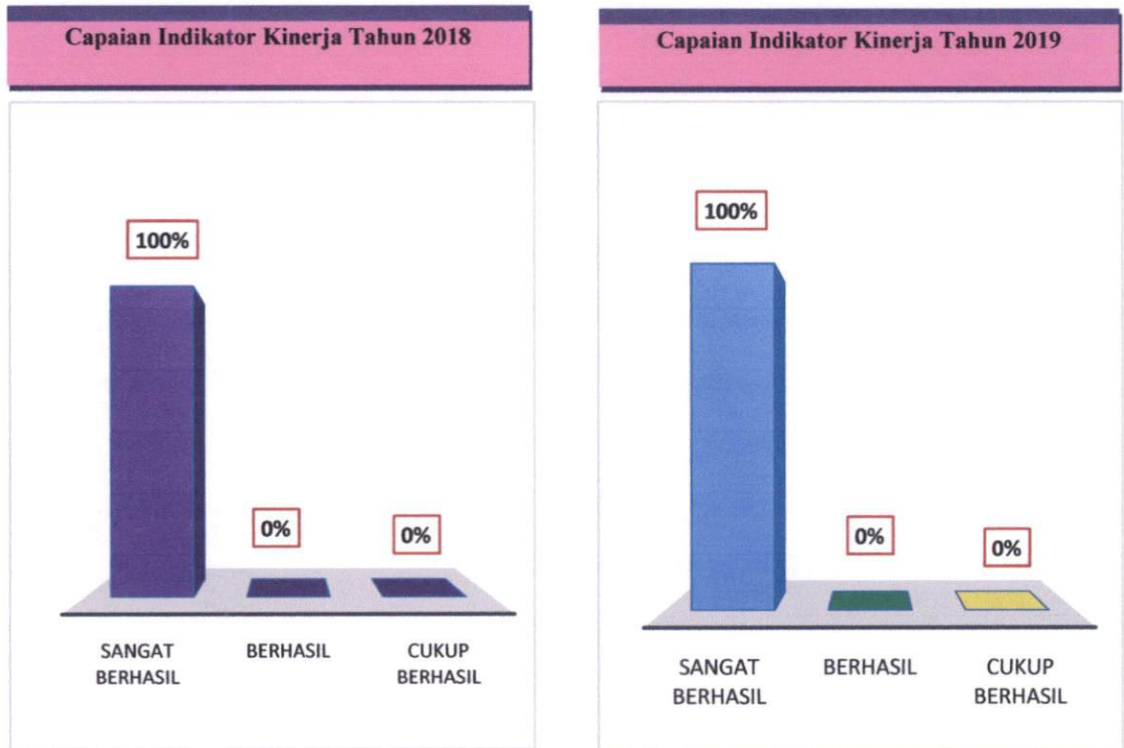
Ilustrasi perbandingan antara target dan capaian IKM pada Sasaran Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik dapat digambarkan dalam sebuah grafik seperti di bawah ini.

Grafik3: Perbandingan Target dan Realisasi Indikator Indek Kepuasan Masyarakat (IKM) Tahun 2019



penilaian tingkat capaiannya sama-sama “**Sangat Berhasil**”. Perbandingan capaian indikator kinerja Tahun 2018 dengan 2019 adalah sebagai berikut.

Grafik 2. Perbandingan Capaian Indikator Kinerja Tahun 2018 dan 2019



Adapun uraian dan analisis mengenai capaian sasaran dan indikatornya, dapat dijelaskan sebagai berikut.

MISI I Mewujudkan Pemerintahan yang Berwibawa, Transparan dan Bertanggung Jawab serta dapat Melaksanakan Kepimpinan dengan Bijak, Berani dan Ikhlas

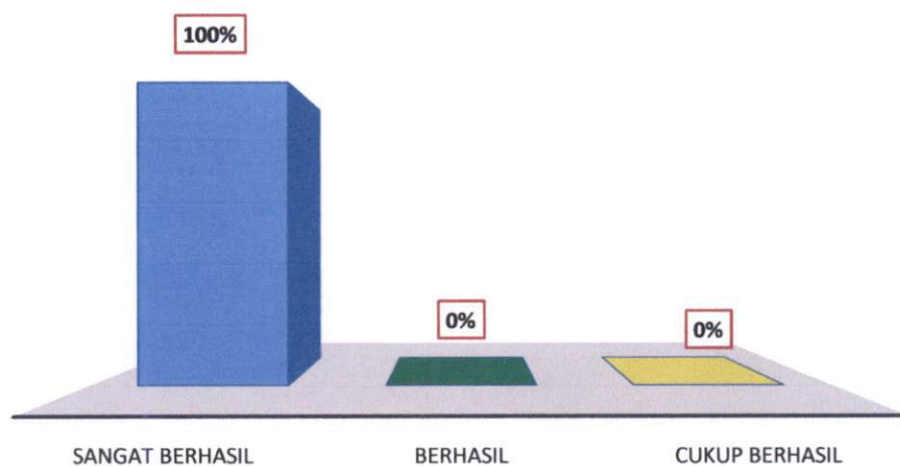
5.	Harmonisasi Peraturan Daerah (Perda)	5.1	Persentase Peraturan Daerah (Perda) yang lulus uji harmonisasi	70%	70%*	100%
----	--------------------------------------	-----	--	-----	------	------

3.2. Analisis Kinerja

Capaian kinerja merupakan dasar dalam menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan sesuai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Secara keseluruhan target kinerja Sekretariat Daerah Kabupaten Bengkalis telah tercapai dan berhasil dilaksanakan. Dari 5 (lima) sasaran dan terdiri dari 8 (delapan) indikator yang telah ditetapkan, secara keseluruhannya dinyatakan **“Sangat Berhasil”**, dengan tingkat efisiensi anggaran sebesar **8,44%**.

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja tahun 2019 terhadap 5 (lima) sasaran dan terdiri dari 8 (delapan) indikator dapat disimpulkan bahwa secara keseluruhan tercapai dengan predikat **“Sangat Berhasil”**.

Grafik1. Kondisi Capaian Indikator Kinerja Tahun 2019



Capaian indikator kinerja tahun 2019, jika dibandingkan dengan capaian indikator kinerja tahun 2018 mengalami kenaikan, namun kriteria

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas Kinerja Sekretariat Daerah Kabupaten Bengkalis merupakan bentuk pertanggungjawaban kinerja yang memuat realisasi dan tingkat capaian kinerja yang diperjanjikan tahun 2019. Pengukuran dilakukan dengan cara membandingkan antara target sasaran yang ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja dengan realisasinya.

3.1. Pengukuran Kinerja

No.	Sasaran	Indikator Kinerja Sasaran	Target	Realisasi	Capaian	
1	2	3	4			
1.	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	1.1.	Indek Kepuasan Masyarakat (IKM)	74,75%	84,79%*	113,43%
		1.2	Persentase OPD dengan IKM minimal 70	90%	100%*	111,11%
		1.3	Persentase tindak lanjut penyelesaian pengaduan masyarakat	100%	100%*	100%
2.	Meningkatnya kualitas Reformasi Birokrasi (RB)	2.1.	Indek Reformasi Birokrasi (RB)	70	70*	Tercapai
		2.2	Persentase SOPD dengan hasil evaluasi organisasi tepat fungsi dan ukuran	85%	85%*	Tercapai
3.	Meningkatnya Kinerja Setda Kabupaten Bengkalis	3.1	Persentase peningkatan Kinerja Setda Kabupaten Bengkalis	20%	20%*	Tercapai
4.	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Setda Kabupaten Bengkalis	4.1	Predikat akuntabilitas kinerja Sekretariat Daerah Kabupaten Bengkalis	BB	BB	Tercapai

4.	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Setda Kabupaten Bengkalis	4.1	Predikat akuntabilitas kinerja Sekretariat Daerah Kabupaten Bengkalis	BB
5.	Harmonisasi Peraturan Daerah (Perda)	5.1	Persentase Peraturan Daerah (Perda) yang lulus uji harmonisasi	70%

3.	Meningkatnya Kinerja Setda Kabupaten Bengkulu	3.1.	Persentase peningkatan Kinerja Setda Kabupaten Bengkulu	-	-	-	20%	30%	40%
4.	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Setda Kabupaten Bengkulu	4.1	Predikat akuntabilitas kinerja Sekretariat Daerah Kabupaten Bengkulu	CC	B	B	BB	BB	BB
5.	Harmonisasi Peraturan Daerah (Perda)	5.1	Persentase Peraturan Daerah (Perda) yang lulus uji harmonisasi	-	-	-	70%	80%	90%

2.3. Perjanjian Kinerja Tahun 2019

No.	Sasaran	Indikator Kinerja Sasaran		Target
1	2	3		4
1.	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	1.1.	Indek Kepuasan Masyarakat (IKM)	74,75%
		1.2	Persentase OPD dengan IKM minimal 70	90%
		1.3	Persentase tindak lanjut penyelesaian pengaduan masyarakat	100%
2.	Meningkatnya kualitas Reformasi Birokrasi (RB)	2.1.	Indek Reformasi Birokrasi (RB)	70
		2.2	Persentase SOPD dengan hasil evaluasi organisasi tepat fungsi dan ukuran	85%
3.	Meningkatnya Kinerja Setda Kabupaten Bengkulu	3.1	Persentase peningkatan Kinerja Setda Kabupaten Bengkulu	20%

Tabel 2.1. Skala Pengukuran Ordinal Peringkat Kinerja

No.	Interval Nilai Realisasi Kinerja	Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja	Kode
1.	>95	Sangat Berhasil	
2.	80 s/d 95	Berhasil	
3.	50 s/d 80	Cukup Berhasil	
4.	< 50	Kurang Berhasil	

Sumber: Permendagri No. 54 Tahun 2010, diolah

2.2. Rencana Strategis Tahun 2016 -2021

No.	Sasaran	Indikator	Target						
			2016	2017	2018	2019	2020	2021	
1.	Meningkatnya kualitas pelayanan publik	1.1.	Indek Kepuasan Masyarakat (IKM)	56,50%	61,25%	68,45%	74,75%	78,80%	80%
		1.2	Persentase OPD dengan IKM minimal 70	-	-	-	90%	95%	100%
		1.3	Persentase tindaklanjut penyelesaian pengaduan masyarakat	-	100%	100%	100%	100%	100%
2.	Meningkatnya kualitas Reformasi Birokrasi (RB)	2.1	Indek Reformasi Birokrasi (RB)	-	-	-	70%	75%	80%
		2.2	Persentase SOPD dengan hasil evaluasi organisasi tepat fungsi dan ukuran	-	-	-	85%	95%	100%

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

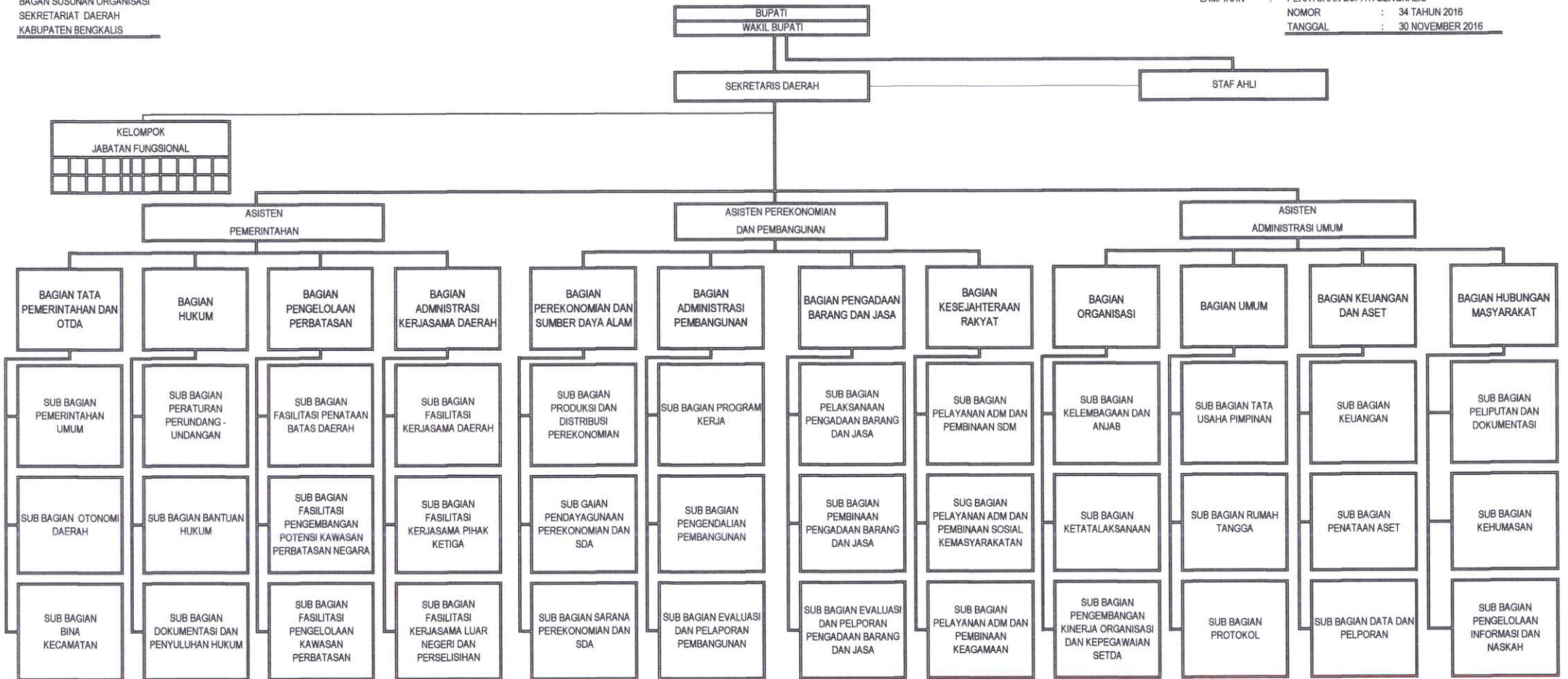
Laporan Akuntabilitas Kinerja (LAKIP) Sekretariat Daerah Kabupaten Bengkalis tahun 2019 ini disusun untuk menjawab Perjanjian Kinerja Sekretariat Daerah Kabupaten Bengkalis Tahun 2019. Penyusunan LAKIP ini mengacu pada Rencana Strategis (Renstra) Sekretariat Daerah Kabupaten Bengkalis Tahun 2016 – 2021 dan RPJMD Kabupaten Bengkalis Tahun 2016– 2021 yang telah ditetapkan menjadi Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 11 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bengkalis tahun 2016-2021.

2.1. Kerangka Pengukuran Kinerja

Proses awal pengukuran kinerja adalah pengumpulan data kinerja dari setiap target kinerja sasaran strategis yang telah ditetapkan dalam dokumen penetapan kinerja. Pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program serta sasaran yang telah ditetapkan pada Sekretariat Daerah Kabupaten Bengkalis, dalam rangka mewujudkan misi dan visi Pemerintah Kabupaten Bengkalis.

Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) diperoleh berdasarkan pengukuran atas indikator kinerja sasaran strategis yang ditetapkan menjadi indikator kinerja utama Sekretariat Daerah Kabupaten Bengkalis. Cara penyimpulan hasil pengukuran kinerja pencapaian sasaran strategis dilakukan dengan membuat capaian rata-rata atas capaian indikator kinerja sasaran.

Predikat capaian kinerja dikelompokkan dalam skala pengukuran ordinal yang tersaji pada tabel 2.1 di bawah ini.



BUPATI BENGKALIS

AMRIL MUKMININ

Gambar1. Bagan Struktur Organisasi Setda Kabupaten Bengkalis



Sumber: Peraturan Bupati Bengkalis No. 34 Tahun 2016

1.3. Tugas Pokok dan Fungsi

Berdasarkan Pasal 3 Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 03 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bengkalis, Sekretaris Daerah mempunyai tugas membantu Bupati dalam menyusun kebijakan dan pengkoordinasian administratif terhadap pelaksanaan tugas Perangkat Daerah serta pelayanan administratif.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 03 Tahun 2016 di atas, Sekretaris Daerah Kabupaten Bengkalis menyelenggarakan fungsi sebagaimana diatur dalam Pasal 4 Peraturan Bupati Bengkalis Nomor 34 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Eselonering, Tugas, Fungsi Dan Uraian Tugas Serta Tata Kerja Pada Sekretariat Daerah Kabupaten Bengkalis, yaitu meliputi;

- a. Pengkoordinasian penyusunan kebijakan Daerah
- b. Pengoordinasian pelaksanaan tugas satuan kerja Perangkat Daerah
- c. Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan Daerah
- d. Pelayanan administratif dan pembinaan Aparatur Sipil Negara pada Perangkat Daerah; dan
- e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

1.4. Struktur Organisasi

Berdasarkan Pasal 3 Peraturan Bupati Bengkalis Nomor 34 Tahun 2016 tersebut, Susunan Organisasi Sekretariat Daerah terdiri dari 1 (satu) orang Sekretaris Daerah, 3 (tiga) orang Asisten Sekretaris Daerah, 12 (dua belas) Bagian, 36 (tiga puluh enam) Sub Bagian dan Kelompok Jabatan Fungsional, dengan susunan organisasi sebagaimana termuat pada Bagan Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Bengkalis, sebagai berikut :

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Penyusunan Laporan Kinerja (LKj) merupakan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, di mana pelaporan capaian kinerja organisasi secara transparan dan akuntabel merupakan bentuk pertanggungjawaban atas kinerja instansi pemerintah. Proses penyusunan LKj dilakukan pada setiap akhir tahun anggaran bagi setiap instansi untuk mengukur pencapaian target kinerja yang sudah ditetapkan dalam dokumen perjanjian kinerja. Pengukuran pencapaian target kinerja ini dilakukan dengan membandingkan antara target dan realisasi kinerja setiap instansi pemerintah, yang dalam hal ini adalah Sekretariat Daerah Kabupaten Bengkalis. LKj menjadi dokumen laporan kinerja tahunan yang berisi pertanggung-jawaban kinerja suatu instansi dalam mencapai tujuan/ sasaran strategis instansi.

Mengacu kepada Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014, LKj tingkat Organisasi Perangkat Daerah disampaikan kepada Kepala Daerah.

1.2. Maksud dan Tujuan LAKIP

Laporan ini dimaksudkan sebagai bahan evaluasi dan pertanggungjawaban atas kinerja Sekretariat Daerah Kabupaten Bengkalis dalam melaksanakan berbagai program dan kegiatan di tahun 2019. Adapun tujuan penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) ini adalah ;

- a. Sebagai sarana bagi Sekretariat Daerah Kabupaten Bengkalis untuk menyampaikan pertanggungjawaban atas capaian kinerja yang diperoleh selama tahun 2019 kepada seluruh stakeholders,
- b. Sebagai sarana evaluasi atas pencapaian kinerja Sekretariat Daerah Kabupaten Bengkalis sebagai upaya untuk memperbaiki kinerja di masa mendatang.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
RINGKASAN EKSEKUTIF	ii
DAFTAR ISI	iii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Maksud dan Tujuan LAKIP	1
1.3. Tugas Pokok dan Fungsi	2
1.4. Struktur Organisasi	2
BAB II PERENCANAAN KINERJA	5
2.1. Kerangka Pengukuran Kinerja	5
2.2. Rencana Strategis Tahun 2016 - 2021	6
2.3. Perjanjian Kinerja Tahun 2019	7
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	9
3.1. Pengukuran Kinerja	9
3.2. Analisis Kinerja	10
3.3. Realisasi Anggaran	21
3.4. Analisis Efisiensi	22
BAB IV PENUTUP	24
LAMPIRAN	26

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Allah SWT atas limpahan rahmat, taufiq dan hidayah-Nya, sehingga penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Sekretariat Daerah Kabupaten Bengkalis Tahun 2019 ini dapat diselesaikan dengan baik.

LAKIP ini disusun sebagai bentuk implementasi Peraturan Presiden Nomor: 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia No. 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Penyusunan LAKIP ini sebagai perwujudan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan Misi Sekretariat Daerah Kabupaten Bengkalis dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2019. LAKIP ini menyajikan capaian kinerja Sekretariat Daerah Kabupaten Bengkalis Tahun 2019 dan analisisnya, sebagai bentuk pertanggungjawaban formal atas semua pelaksanaan program dan kegiatan yang telah dilakukan, sebagaimana telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2019.

Walaupun masih banyak kekurangan dalam penyusunan LAKIP ini, namun kami berharap dapat digunakan sebagai bahan untuk perbaikan dan peningkatan kinerja secara berkelanjutan, serta optimalisasi peran dan peningkatan efisiensi, efektivitas dan produktivitas kinerja Sekretariat Daerah Kabupaten Bengkalis pada tahun-tahun selanjutnya, sehingga secara keseluruhan dapat mendukung kinerja Pemerintah Kabupaten Bengkalis.

Selanjutnya, diharapkan kritik dan saran dari pembaca serta stakeholder untuk perbaikan penyusunan LAKIP dimasa mendatang.

Akhirnya kami mengucapkan banyak terima kasih kepada semua pihak yang telah berperan dalam penyusunan LAKIP ini, semoga Allah SWT meridhoinya. Aamiin.

Bengkalis, Februari 2020

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BENGKALIS



H. BUSTAMI. HY, SH, MM
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19640907 198603 1 009

RINGKASAN EKSEKUTIF

Sekretariat Daerah Kabupaten Bengkalis merupakan salah satu Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Bengkalis sesuai dengan Pasal 3 Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Bengkalis Nomor 03 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bengkalis. Sekretariat Daerah Kabupaten Bengkalis mempunyai tugas membantu Bupati dalam penyusunan kebijakan dan pengkoordinasian administratif terhadap pelaksanaan tugas Perangkat Daerah serta pelayanan administratif.

Selain tugas tersebut, dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 Perda Nomor 03 Tahun 2016 di atas, Sekretaris Daerah Kabupaten Bengkalis menyelenggarakan fungsi sebagaimana diatur dalam Pasal 4 Peraturan Bupati Bengkalis Nomor 34 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Eselonering, Tugas, Fungsi dan Uraian Tugas Serta Tata Kerja Pada Sekretariat Daerah Kabupaten Bengkalis, sebagai berikut:

- (1) Pengkoordinasian penyusunan kebijakan daerah
- (2) Pengkoordinasian pelaksanaan tugas satuan kerja perangkat daerah
- (3) Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah
- (4) Pelayanan administratif dan pembinaan Aparatur Sipil Negara pada perangkat daerah; dan
- (5) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya

Sebagai bentuk komitmen pelaksanaan atas tugas dan fungsi tersebut telah ditandatangani Perjanjian Kinerja (PK) tahun 2019 yang meliputi sasaran, indikator dan target kinerja yang harus dicapai. Pengukuran capaian kinerja dilakukan dengan cara membandingkan antara target sasaran dengan realisasinya. Berdasarkan PK tahun 2019, Sekretariat Daerah Kabupaten Bengkalis terdapat 5 (lima) sasaran yang terdiri dari 8 (delapan) indikator untuk menilai realisasi dan capaian di tahun 2019.

Secara keseluruhan Perjanjian Kinerja tahun 2019 Sekretariat Daerah Kabupaten Bengkalis telah tercapai, yaitu dari 5 (lima) sasaran yang terdiri dari 8 (delapan) indikator kinerja, seluruhnya dinilai sudah tercapai dan terpenuhi, dengan predikat **“Sangat Berhasil”** dengan rata – rata nilai capaian kinerja sebesar **101,60%** serta tingkat efisiensi anggaran sebesar **8,44%**.

Keberhasilan pencapaian berbagai indikator kinerja di Sekretariat Daerah Kabupaten Bengkalis merupakan hasil kerjasama segenap jajaran Sekretariat Daerah Kabupaten Bengkalis, serta bimbingan, dukungan dan komitmen yang tinggi dari pimpinan. Untuk tahun 2019, Sekretariat Daerah Kabupaten Bengkalis berkomitmen untuk mempertahankan dan meningkatkan kinerja dengan menerapkan prinsip-prinsip *good governance dan clean governance*.

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Allah SWT atas limpahan rahmat, taufiq dan hidayah-Nya, sehingga penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Sekretariat Daerah Kabupaten Bengkalis Tahun 2019 ini dapat diselesaikan dengan baik.

LAKIP ini disusun sebagai bentuk implementasi Peraturan Presiden Nomor: 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia No. 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Penyusunan LAKIP ini sebagai perwujudan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan Misi Sekretariat Daerah Kabupaten Bengkalis dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2019. LAKIP ini menyajikan capaian kinerja Sekretariat Daerah Kabupaten Bengkalis Tahun 2019 dan analisisnya, sebagai bentuk pertanggungjawaban formal atas semua pelaksanaan program dan kegiatan yang telah dilakukan, sebagaimana telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2019.

Walaupun masih banyak kekurangan dalam penyusunan LAKIP ini, namun kami berharap dapat digunakan sebagai bahan untuk perbaikan dan peningkatan kinerja secara berkelanjutan, serta optimalisasi peran dan peningkatan efisiensi, efektivitas dan produktivitas kinerja Sekretariat Daerah Kabupaten Bengkalis pada tahun-tahun selanjutnya, sehingga secara keseluruhan dapat mendukung kinerja Pemerintah Kabupaten Bengkalis.

Selanjutnya, diharapkan kritik dan saran dari pembaca serta stakeholder untuk perbaikan penyusunan LAKIP dimasa mendatang.

Akhirnya kami mengucapkan banyak terima kasih kepada semua pihak yang telah berperan dalam penyusunan LAKIP ini, semoga Allah SWT meridhoinya. Aamiin.

Bengkalis, Februari 2020

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BENGKALIS



H. BUSTAMI. HY, SH, MM
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19640907 198603 1 009

**LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA
INSTANSI PEMERINTAH
(LAKIP)**



**SEKRETARIAT DAERAH
KABUPATEN BENGKALIS**

TAHUN 2020